

**KRONIKA**

**191.000 Orang tinggalkan Libia**

JAKARTA: Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan 191.000 orang telah melarikan diri dari Libia.



"Secara keseluruhan [orang yang lari dari Libia] mencapai 191.748 orang, sebagian besar dari mereka adalah pekerja imigran," tulis laporan dewan PBB untuk Urusan Kemanusiaan, kemarin.

Anehnya, pemimpin Libia Moamar Khaddafi akhir pekan lalu justru meminta PBB untuk menyelidiki kerusuhan yang mengguncang Libia

"Saya ingin komisi penyelidikan PBB atau Uni Afrika datang ke Libia," katanya kepada mingguan Prancis *Le Journal du Dimanche* seperti dikutip AFP. (AP/ANTARA/IF)

**FIFA difasilitasi sidak PSSI**



JAKARTA: Duta Besar Indonesia untuk Swiss Djoko Susilo akan memfasilitasi Presiden FIFA Joseph "Sepp" Blatter untuk datang ke Indonesia melihat langsung kondisi sepak bola di Tanah Air termasuk menginspeksi mendadak PSSI.

"Kami akan menemui Blatter Selasa jika dia akan langsung ke Indonesia untuk bertemu pemerintah dan KONI, kami akan memfasilitasi dengan maksimal," ujarnya saat dikonfirmasi dari Jakarta melalui telepon internasional, akhir pekan lalu. (ANTARA)

**DPR akan tuntaskan 20 RUU**

JAKARTA: Ketua DPR Marzuki Alie optimistis DPR mampu menyelesaikan 20 Rancangan Undang-Undang pada masa sidang ke III yang akan ditutup April mendatang.

"DPR menargetkan angka 20 RUU akan tercapai pada akhir masa sidang sekarang yang akan ditutup 4-5 minggu ke depan," ujarnya di Gedung DPR, akhir pekan lalu.

Optimisme Marzuki karena dia melihat sudah banyak RUU yang telah memasuki pembahasan tahap akhir, sehingga tinggal disahkan saja. Meski belum satu pun RUU yang dirampungkan sejak pembukaan masa sidang awal Januari lalu. (BISNIS/12)

# Menteri Golkar & PKS diduga susut

Gerindra belum putuskan masuk koalisi

OLEH JOHN ANDI OKTAVERI & NENENG HERBAWATI  
Bisnis Indonesia

**JAKARTA: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diperkirakan cenderung menambah anggota partai koalisi ketimbang mengurangnya. Sebagai konsekuensi dari langkah tersebut, jatah kursi menteri anggota koalisi yang 'nakal' dipangkas.**

Pengamat politik dari Reform Institute Yudi Latief melihat kecenderungan tersebut tampak dari sikap Presiden yang lebih memilih mempertahankan komposisi parpol pendukung pemerintah, meski dalam beberapa isu strategis Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera sebagai mitra koalisi berlawanan dengan sikap Partai Demokrat.

Bahkan, dia berpendapat sangat mungkin Presiden menggunakan strategi menyerang Golkar dan PKS untuk memasukkan parpol lain ke dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) Parpol Pendukung Koalisi Pemerintahan SBY-Boediono.

"Presiden tidak punya keberanian untuk menghabisi menteri dari PKS maupun Golkar karena SBY juga ingin aman," ujarnya kepada *Bisnis* kemarin saat dimintai komentarnya soal reshuffle kabinet yang kian kencang diwacanakan di ruang publik.

Dia juga merujuk dalam kasus Bank Century di mana sikap Partai Golkar dan PKS berseberangan dengan Partai Demokrat, namun SBY tidak berbuat apa-apa pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II.

Menurut Yudi, tarik-menarik kepentingan antarpol untuk mengincar kursi di kabinet, justru mem-

**Perjalanan reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I dan II**

● Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I dibentuk pada 21 Oktober 2004 untuk masa bakti sampai 2009. Namun, pada 5 Desember 2005, Presiden Susilo Bambang Yudoyono melakukan reshuffle kabinet untuk pertama kalinya:  
 Tiga orang baru masuk kabinet: Boediono (Menko Perekonomian), Paskah Suzetta (Meneng PPN/Kepala Bappenas), Erman Soeparno (Menakertrans).  
 Tiga menteri dirotasi: Aburizal Bakrie (Menko Kesra, sebelumnya Menko Perekonomian), Sri Mulyani (Menkeu, sebelumnya Meneng PPN), Fahmi Idris (Menperin, sebelumnya Menakertrans).

● Pada 7 Mei 2007 Presiden kembali melakukan reshuffle kabinet Indonesia Bersatu Jilid II:

Lima orang baru masuk kabinet: Andi Mattalata (Menkumham), Mohammad Lukman Edy (Meneng PDT), Jusman Syafii Djalal (Menhub), Mohammad Nuh (Menkominfo), Hendarmanto Supandji (Jaksa Agung).  
 Dua menteri dirotasi: Hatta Rajasa (Mensesneg, sebelumnya Menhub) dan Sofyan Djallil (Meneng BUMN, sebelumnya Menkominfo).

Lima menteri diberhentikan: Hamid Awaluddin (Menkumham), Soegiharto (Meneng BUMN), Yusril Isha Mahendra (Mensesneg), Saifullah Yusuf (Meneng PDT), Abdul Rahman Saleh (Jaksa Agung).

● Isu reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II memuncak sejak Partai Golkar dan PKS berseberangan sikap dengan partai Demokrat dalam sidang Paripurna DPR terkait dengan Hak Angket Mafia Pajak pada 22 Februari 2011.



Sumber: Data BIU diolah

BISNIS/ILHAM NESABANA

beri ruang bagi SBY untuk mengurangi jatah menteri Golkar dan PKS dan selanjutnya diberikan kepada kader PDIP atau Gerindra. "Dengan membentuk koalisi yang lebih gemuk, SBY akan berada dalam comfort zone."

Hingga tadi malam belum ada tanda-tanda Presiden akan mengumumkan reshuffle kabinet. Malah, kemarin sore rombongan SBY masih tampak di sekitar Taman Safari. Presiden dijadwalkan bertemu dengan petinggi PKS.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarak mengatakan pertemuan Presiden dengan Golkar dan PKS untuk membahas nasib koalisi, hanya soal waktu.

Sebelum bertemu dengan Golkar dan PKS, lanjut Mubarak, Presiden sudah melakukan pertemuan dengan pimpinan partai anggota koalisi yang menolak Hak Angket Mafia Pajak yakni PKB, PPP dan PAN.

Senada dengan Yudi Latief, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo juga memandang wacana perom-

bakan menteri di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II hanya sebagai manuver politik pemerintah.

"Apalagi, wacana perombakan menteri kabinet didasarkan atas kemarahan parpol tertentu terhadap parpol anggota koalisi," kata Bambang Soesatyo, melalui surat elektronik (e-mail) seperti ditulis *Antara*.

**Bergantung Prabowo**

Dalam perkembangan lain, Partai Gerindra belum mengambil keputusan terkait tawaran untuk masuk koalisi kabinet, sehingga belum menyipakan kadernya, termasuk Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto.

"Kami masih melihat, apakah bisa membantu pemerintah dalam menyelamatkan ekonomi rakyat," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon

Apakah Gerindra masuk koalisi dan siapa nama-nama yang akan mengisi di kabinet, keputusannya ada di tangan Prabowo sebagai ketua dewan pembina. (12) (john.andi@bisnis.co.id/neneng.herbawati.co.id)

# Restitusi pajak sawit 'raib' Rp26 triliun

OLEH ANUGERAH PERKASA  
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Dugaan penyelewengan restitusi pajak tiga perusahaan besar kelapa sawit senilai Rp26 triliun dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan yang mengindikasikan pelanggaran prosedur dalam pemeriksaan pajak.

Sejken Asosiasi Pembiayaan Pajak Indonesia (APPI) Sasmito Hadi Negoro mengatakan salah satu faktor

yang menyebabkan tidak tercapainya target pajak 2010 sebesar Rp700 triliun adalah adanya dugaan penyelewengan dalam restitusi pajak. Oleh karena itu, KPK diminta menelusuri masalah tersebut.

"Salah satunya masalah adanya restitusi Rp40 triliun di mana sekitar Rp26 triliun adalah restitusi Ppn. Kebanyakan dari mereka adalah eksportir CPO (crude palm oil). Apakah benar mereka membeli bahan baku sekitar 10 kali lipat yakni Rp260 triliun?" ujarnya sekuat menyampikan laporan itu KPK bersama dengan Badan Pekerja

tokoh lintas agama, di Jakarta pekan lalu.

Ditjen Pajak mendefinisikan restitusi pajak adalah mekanisme pembayaran kelebihan pembayaran pajak dari wajib pajak apabila

kredit pajak lebih besar daripada pajak terutang. Tiga perusahaan CPO yang dilaporkan APPI ke KPK adalah AAG, PT PHS dan PT WNI.

Pada Desember 2010, BPK menyampaikan temuan audit investigatif tentang dugaan pelanggaran prosedur pemeriksaan pajak Ditjen Pajak terhadap enam perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang dimaksud adalah PT Permata Hijau Sawit (2007-2008), Asian Agri Group (2002-2005), PT Wilmar Nabati Indonesia (2009-2010), PT Alfa Kurnia (2008-2009), PT ING Internasional (2005-2007), dan Rumah Sakit Emma Mojokerto (2006-2008).

**"Salah satu penyebab tak tercapainya target pajak 2010 adalah penyelewengan restitusi"**

**Legitimasi**

Ketua KPK Busray Muqoddas mengatakan laporan Badan Pekerja maupun masyarakat lainnya merupakan legitimasi terhadap KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi.

Walaupun tidak secara spesifik, tetapi Busray menunturkan kasus dugaan mafia pajak akan dirampungkan pada tahun ini.

"Komitmen kami jelas. Kasus mafia pajak akan dirampungkan pada tahun ini, walaupun sangat berat," ujarnya.

Menurut dia, tidak ada pengaruh bagi KPK adanya lingkaran-lingkaran politik dalam penanganan kasus korupsi.

## Kampanye Simpatik Pajak Kanwil DJP Jatim II



Dalam rangka kampanye SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2010, Kanwil DJP Jatim II mengadakan kampanye simpatik yang dilakukan di beberapa titik, antara lain Pintu Tol Waru Utama, Pintu Tol Waru dan Ram, Pintu Tol Sidoarjo dan Bandara Juanda. Kampanye dimaksudkan untuk mengajak dan mengingatkan kembali kewajiban tahunan sebagai warga negara khususnya Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT tahunan PPh Tahun Pajak 2010. Dalam aksi simpatik itu dibagikan souvenir berupa kaus, ballpoint, gantungan kunci, stiker dan permen. Bagi masyarakat yang telah memiliki NPWP dapat mengambil formulir SPT di KPP, KP2KP, atau dapat mengunduh di [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). SPT yang telah diisi dengan benar, jelas dan lengkap dapat disampaikan melalui KPP, KP2KP, Mobil Pajak Keliling atau Drop Box yang telah ditentukan. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi paling lambat disampaikan tanggal 31 Maret 2011, sedangkan SPT Tahunan Badan paling lambat disampaikan tanggal 30 April 2011. (SPA)

